

ANALISIS KRITIS EKSISTENSI PERGURUAN TINGGI NEGERI-SWASTA DI ACEH

Zahrila Ismail¹, Fitri Zulfidar², Mukhlisuddin³, Rossiana Ginting³, F. Abdurrahman⁴, N. Islami⁴

¹SMK Negeri Penerbangan Aceh, Banda Aceh

²STKIP Al-Wasliyah, Banda Aceh

³Universitas Bina Bangsa Getsempena, Banda Aceh

⁴Universitas Islam Kebangsaan Indonesia, Bireuen

Corresponding Author: mukhlisuddin.ilyas@gmail.com

Abstract

Good and integral management is a factors to improve the education in Aceh under the leadership of Nova Iriansyah Governor. The Aceh government has high hopes that in the future educational institutions in Aceh have the capability to produce generation that is not only religiously intelligent, but also technological, language skills and other multi-disciplinary sciences to avoid Aceh from lost generation and scientific uncertainty in filling Aceh's development later. Because this point is central to Aceh's progress, apart from the economy, health, and sustainabel development. For that, one of the urgent efforts that Nova Iriansyah must make is to look for an integral educational paradigm in philosophical, bureaucratic, and implimentative terms. For example, it is integrated in terms of the relationship between Islam and technology, as well as the form of integration of educational institutions/institutions and policies at the provincial level, and others that are in accordance with the culture and culture of Aceh itself. Efforts to find an integrated education paradigm in Aceh must at least be done in the form of a one-stop educational management institutional concept of education. The idea is not impossible to do, du to the Law No. 11 on Aceh Governance opens up opportunities for Aceh to design the management of education in accordance with the culture and style of Aceh independently.

Keywords: Aceh Government, University Existence, Future Development, Management

Abstrak

Manajemen yang baik dan tidak terpisahkan menjadi salah satu faktor perbaikan pendidikan di Aceh di bawah kepemimpinan Gubernur Nova Iriansyah. Pemerintah Aceh sangat berharap kedepan lembaga pendidikan di Aceh memiliki kemampuan untuk menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas beragama, tetapi juga teknologi, kemampuan bahasa dan ilmu multidisiplin lainnya untuk menghindarkan Aceh dari generasi yang hilang dan ketidakpastian keilmuan dalam mengisi. Pembangunan Aceh nanti. Karena titik inilah yang menjadi inti kemajuan Aceh, selain pembangunan ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan. Untuk itu, salah satu upaya mendesak yang harus dilakukan Nova Iriansyah adalah mencari paradigma pendidikan yang tidak terpisahkan dari segi filosofis, birokrasi, dan implimentatif. Misalnya keterpaduan dalam kaitannya dengan hubungan Islam dan teknologi, serta bentuk keterpaduan lembaga / lembaga pendidikan dan kebijakan di tingkat provinsi, dan lain-lain yang sesuai dengan budaya dan budaya Aceh itu sendiri. Upaya menemukan paradigma pendidikan yang terintegrasi di Aceh setidaknya harus dilakukan dalam bentuk konsep kelembagaan pengelolaan pendidikan satu atap. Ide tersebut bukan tidak mungkin dilakukan, karena Undang-Undang Nomor 11 tentang Pemerintahan Aceh membuka peluang bagi Aceh untuk merancang penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan budaya dan gaya Aceh secara mandiri.

Kata Kunci: Pemerintah Aceh, Eksistensi Universitas, Pembangunan, Manajemen

PENDAHULUAN

Pembangunan suatu daerah tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus kolektif dan komprehensif. Pembangunan suatu daerah paska konflik, seperti Aceh, harus dilakukan secara komprehensif. Pada prinsipnya, membangun suatu masyarakat selalu dipengaruhi oleh konflik. Begitu

juga sebaliknya, magnet konflik mengakibatkan pembangunan tidak berjalan normal. Kadang-kadang pembangunan suatu daerah, yang seharusnya untuk memperbaiki kehidupan masyarakat, yang terjadi justru menjadi sumber konflik di masyarakat itu sendiri.

Akibatnya menjadi penting, untuk mengintegrasikan dimensi-dimensi sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam membangun suatu daerah. Pembangunan dengan menyatukan beragam teori, akan membuat pembangunan lebih efektif. Dan itulah sebenarnya maksud dari pembangunan berkelanjutan.

International Peace Academy (tahun 2003), menyebutkan bahwa dalam konteks daerah paska-konflik, membangun harus peka terhadap konflik. Hal itu di perlukan untuk mengatasi kesenjangan sosial-ekonomi, ketidakadilan, kemiskinan, pengangguran dan hambatan perdamaian lainnya yang mengancam proses pembangunan dan perdamaian. Menurut Bank Dunia, konflik dan pembangunan selalu bermuara kepada tiga hal. (1) Konflik memperlambat pembangunan, (2) Pembangunan mengarah ke konflik, (3) Konflik terjadi karena kurangnya pembangunan.

Pembangunan dan konflik saling terkait satu dengan yang lainnya. Pertumbuhan ekonomi yang pesat, maka tingkat kriminalitas juga tumbuh dengan sendirinya. Demikian pola kerja teori ketamaman versus keluhan (*greed versus gravence*). Setiap konflik harus di reduksi, apalagi yang mengarah kepada konflik horizontal, atau konflik etnik. Konflik etnis adalah perdebatan atau perselisihan antar kelompok etnis tertentu dengan masalah politik, ekonomi, sosial budaya atau wilayah.

Konflik etnis sifatnya adalah horizontal, terjadi karena adanya berlainan interaksi antar kelompok etnis dalam berbagai ragam permasalahan. Ada juga terjadi konflik etnis karena perubahan posisi untuk mencari keadilan antar etnis. Dan indikasi lain adalah terpelajar tapi miskin. Dalam kemelut seperti itu, sudah seharusnya Perguruan Tinggi harus memiliki andil dalam memberi solusi dan jalan keluar yang bermartabat bagi pembangunan daerah dan masyarakat. Salah satunya dengan manajemen yang berbasis integral (satu atap)

Manajemen yang baik dan integral adalah menjadi salah satu faktor untuk memajukan Pendidikan di Aceh kedepan dibawah kepemimpinan Gubernur Nova Iriansyah. Pemerintah Aceh haru memasang harapan besar supaya kedepan lembaga pendidikan di Aceh harus mampu melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas agama, melainkan juga teknologi, kecakapan bahasa dan multi disiplin keilmuan lainnya untuk menghindari Aceh dari *lost generation* dan kegamangan keilmuan dalam mengisi pembangunan Aceh nantinya. Karena titik inilah sentral kemajuan Aceh, selain ekonomi, kesehatan (Mukhlisuddin Ilyas, 12:2008).

Untuk itu, salah satu upaya yang mendesak harus dilakukan Nova Iriansyah adalah mencari paradigma pendidikan integral dalam hal filosofis, birokratis, implimentatif. Misalnya terpadu dalam hal keterkaitan antara Islam dan teknologi, serta bentuk keterpaduan lembaga/institusi penyelenggaraan dan kebijakan pendidikan pada level provinsial, dan lainnya yang sesuai dengan kultur dan budaya Aceh itu sendiri. Upaya mencari paradigma pendidikan terpadu di Aceh setidaknya harus dilakukan dalam

bentuk konsep pendidikan kelembagaan manajemen pendidikan satu atap. Gagasan itu bukan mustahil untuk dilakukan, karena UU No 11 tentang Pemerintahan Aceh membuka peluang bagi Aceh untuk mendesain manajemen penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan kultur dan corak keacehan secara mandiri.

STUDI LITERATUR

Pada dasarnya Pendidikan dalam arti konsep telah lama digulirkan dalam berbagai diskursus. Malah dalam al-Qur`an gagasan yang paling canggih, komprehensif dan mendalam pembahasannya adalah mengenai konsep `ilm. Tingkat kepentingannya berada di bawah pembahasan tauhid, yang merupakan tema sentral dalam pembahasan al-Qur`an. Pentingnya konsep pendidikan `ilm terungkap dalam kenyataan bahwa al-Qur`an sering kali menyebut kata-kata `ilm. Karena konsep `ilm membedakan pandangan dunia Islam dari cara pandang dan ideologi lainnya (Mukhlisuddin Ilyas, 2004).

Maka dalam hal ini, Pemerintah Aceh setidaknya harus memikirkan konsep pendidikan yang filosofis untuk melahirkan sumber daya manusia yang handal dan profesional. Bentuk konsepsi pendidikan terpadu/integral nantinya benar-benar harus mampu memberi mencontoh (setidaknya) pola-pola pembelajaran pendidikan Pesantren Modern/Dayah Modern dewasa ini.

Ini adalah bagian dari strategi implimentasi pendidikan integral antara memadukan proses pendidikan umum dan agama di semua jenjang sekolah di Aceh dalam bentuk manajemen kelembagaan. Dalam perumusan konsep pendidikan Aceh, tidak boleh "menutupi diri" untuk melakukan implimentasi pendidikan yang bersifat terpadu/integralistik. Karena apabila pendidikan Islam keluar dari dikotomi dengan cara pengimplimentasian pendidikan Islam an sich, maka proses pendidikan Islam tidak akan berjalan dinamis dalam menyahuti perkembangan global. Supaya itu dapat diatasi, maka diperlukan penerapan konsep pendidikan yang bersifat integralistik. Karena proses pendidikan integral akan tergambar rahmatan lil `alamin dari produk keilmuan yang akan dipelajari.

Namun rencana implimentasi konsep pendidikan integral atau terpadu harus diakui tidaklah mudah. Mantan rektor IAIN Ar-Raniry, Prof Yusny Saby (2001), menyebutkan tiga tantangan untuk mencapai tujuan konsep pendidikan integral (terpadu) apabila dalam suatu komunitas masyarakat telah "membumi" terlalu lama menganut konsep pendidikan sekuler seperti Aceh saat ini. Tantangan yang sangat berat menurut Yusny Saby, berada pada tiga titik.

Pertama adalah Birokrasi: Apa yang dimaksud birokrasi disini ialah pengelolaan pendidikan itu harus berada pada satu tangan yang tegas. Kalau selama ini ada dua menager pendidikan: agama dan umum, maka penyatuan ini akan menghilangkan peluang formasi jabatan, anggaran, dan kesempatan-kesempatan lainnya.

Kedua adalah SDM (Sumber Daya Manusia): Bahwa dengan penyatuan sistem pendidikan,

maka setiap yang terlibat dalam urusan pendidikan adalah SDM (Sumber Daya Manusia) yang profesional, handal, yang akan menjadi uswah hasanah bagi anak didik. Bekerja dalam manajemen lembaga pendidikan atau menjadi pendidik tidak boleh lagi amatiran, sebagai tempat mencari makan, karena lowongan tempat lain tidak ada.

Ketiga adalah Kurikulum: Dalam hal ini tidak hanya terbatas pada pemahaman biasa bahwa setiap mata pelajaran atau bidang ilmu sudah jadi. Kurikulum di sini juga menyangkut bagaimana epistemologi suatu disiplin ilmu itu disusun. Sebuah lembaga yang dipimpin oleh para ilmuwan Muslim telah menyusun suatu konsep tentang islamisasi ilmu pengetahuan. Dulu antropologi itu masih Islami, kemudian disekulerkan, sekarang harus dirumuskan kembali sehingga ada yang namanya “Islamic anthropology, Islamic economic, Islamic arts, dsb” (Yusni Saby: 2001: 4).

Langkah selanjutnya harus ditempuh adalah mengupayakan lahirnya lembaga pengelola pendidikan dalam bentuk manajemen satu atap di Aceh. Selama ini yang terjadi adalah proses konseptual, managerial dan implementasi pembelajaran terjadi dikotomi. Dalam hal ini, dinas pendidikan mengurus sekolah-sekolah yang beraliran umum dan departemen agama mengurus sekolah beraliran agama.

Bisa jadi selama ini karena dikotomi telah menjadi kunci utama kegagalan proses mencerdaskan generasi muda Aceh dewasa ini. Untuk itu, tawaran pengelolaan pendidikan di Aceh berlangsung dalam manajemen satu atap (terutama dalam hal, konseptual, kurikulum, dana, dan kebijakan) menjadi kewajiban bagi Nova Iriansyah untuk mengkaji lebih komprehensif.

PEMBAHASAN

Eksistensi Universitas Negeri Malikussaleh

Aceh harus benar-benar serius memformulasikan sistem pendidikan yang berdampak bagi kemajuan jangka panjang. Untuk itu, Pemerintah Aceh harus berani melakukan investasi dalam sektor pendidikan. Salah satu caranya adalah besar harapan harus adanya keberpihakan anggaran untuk sektor pendidikan diperbesar bukan justru diperkecil.

Membangun pendidikan yang berkelanjutan dan berdampak bagi pembangunan ekonomi tidak cocok lagi dengan slogan-slogan, tapi karya nyata yang perlu ditunjukkan. Sudah saatnya, pendidikan menjadi leading sector dalam pembangunan Aceh dibawah Nova Iriansyah. Saat ini, hampir setiap negara telah menjadikan pendidikan sebagai bagian terpenting dalam melakukan perubahan terhadap sistem pendidikan nasionalnya.

Dalam hal ini, ada dua domain mendesak yang perlu dilakukan dalam penguatan pembangunan pendidikan Aceh. Domain pertama adalah manajemen dalam perspektif organisasi, sumber daya guru/dosen. Sedangkan domain kedua adalah substansi yang operasional seperti implementasi

kurikulum yang sustainable.

Domain manajemen harus dimulai dari perencanaan, organisasi sampai dengan kebijakan pendidikan yang holistik untuk dapat membawa manfaat bagi seluruh warga Aceh. Sedangkan domain kurikulum, harus benar-benar di rancang untuk pembangunan Aceh jangka panjang. Karena pendidikan yang baik adalah pendidikan yang berjalan dalam jalur yang sesuai dengan manajemen yang sistematis dan komprehensif.

Bila manajemen pendidikan tidak diperkuat, maka akan menimbulkan permasalahan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kualitas pendidikan Aceh. Akibat tidak optimalnya pendayagunaan anggaran dan sumber daya guru/dosen bagi penguatan pendidikan Aceh, maka peringkat buruk dalam skala nasional selalu menghantui pendidikan kita. Kedepan, Pemerintah Aceh perlu memikirkan untuk mendesai pembangunan pendidikan yang berkualitas dan juga berdampak bagi pembangunan ekonomi masyarakat Aceh.

Di lihat secara geografis dan demografis, kawasan Aceh Utara-Lhokseumawe memiliki nilai tawar berbasis ekonomi dalam pembangunan pendidikan Aceh jangka panjang. Provinsi Aceh, setidaknya telah sukses menjadikan kawasan Darussalam menjadi kawasan transaksi ekonomi dan jasa. Begitu banyak sumber daya manusia terserap menjadi tenaga-tenaga yang terampil.

Jadi tidak mustahil, bila Pemerintah Aceh dibawah Nova Iriansyah membuat terobosan spektakuler dengan menciptakan kawasan Lhokseumawe sebagai kota pelajar baru, setelah Darussalam di Banda Aceh. Jika ini dilakukan oleh Pemerintah Aceh, maka tidak mustahil kedepannya branding Lhokseumawe berubah menjadi kota pelajar.

Selama ini, Lhokseumawe dan Aceh Utara dikenal dengan kota industri. Namun branding kota industri segera hilang, karena bahan bakunya sudah mulai habis. Penduduk Aceh Utara yang dulunya dikenal sebagai daerah pertanian berubah menjadi daerah industri. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini di kuras dengan teknologi canggih, membuat nama Lhokseumawe dikenal seantero dunia sebagai penyumbang gas alam yang besar. Sehingga Indonesia menjadikan Aceh sebagai daerah penyumbang energi bagi keberlangsungan hidup masyarakat nasional.

Kesempatan emas tersebut kurang dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk mensejahterakan masyarakatnya dalam waktu jangka panjang. Hal ini terlihat dengan tidak adanya blueprint yang jelas untuk Aceh pasca habisnya Gas Alam dan minyak. Padahal semua orang tahu gas minyak bumi pasti akan habis dan lama sekali baru dapat diperbaharui. Sedikit sekali ada pemikiran apalagi tindakan terhadap alternatif antisipasi ketika sumber daya alam habis.

Belum terlambat, jika Pemerintah Aceh memiliki keinginan untuk menjadikan pendidikan sebagai leading sector dengan cara mendesain Lhokseumawe dari Kota industri menjadi Kota jasa pada bidang pendidikan atau disebut sebagai Kota Pelajar. Hal ini tidak berlebihan, karena Lhokseumawe

dulunya yang dikenal sebagai kerajaan Pasee dengan memiliki keuntungan dari segi geografi yang sentral di kawasan pesisir Aceh. Dan diuntungkan secara demografi dimana jumlah penduduk Aceh sebagian besarnya mendiami kawasan pesisir.

Saat ini, kita terlalu sibuk melihat prospek pembangunan ekonomi dengan waktu temporer. Kita lupa bahwa sektor pendidikan menjadi salah satu katalisator bagi pembangunan ekonomi jangka panjang bagi Aceh. Di beberapa negara, telah menjadikan sektor jasa bidang pendidikan sebagai sumber pendapatan negaranya.

Kita di Aceh, berharap semoga Pemerintah Aceh dibawah kepemimpinan Nova Iriansyah, Serious dan peduli untuk menjadikan pendidikan sebagai leading sector pembangunan ekonomi masyarakat Aceh kedepan. Salah satu strateginya adalah dengan mendukung finansial untuk ekspansi kampus-kampus di Aceh. Semoga kedepan, kawasan Pasee dipenuhi dengan para cendikia yang senantiasa dinantikan karya-karyanya untuk mensejahterakan masyarakat Aceh.

Eksistensi Universitas Negeri Teuku Umar

Perhatian pemerintah terhadap pembangunan pertanian masih dirasakan sangat minim. Apalagi bicara soal keberpihakan sungguh kita belum melihat energi besar dari pemerintah ini untuk mendorong sektor pertanian menjadi penghela pertumbuhan ekonomi di Aceh. Padahal sektor ini sangat menjanjikan dan menyimpan potensi besar untuk kemakmuran Aceh di masa akan datang. Maka pantai Barat-Selatan Aceh yang memiliki potensi yang amat sangat besar di sektor ini akan menjadi tempat bangkitnya ekonomi Aceh. Barat Selatan adalah masa depan Aceh yang dinantikan.

Ketika PT Arun NGL akan mengakhiri kegiatannya pada 2014 mendatang dan kemudian pabrik ini menjadi terminal regasifikasi yang berkapasitas 405 MMSCFD (million metric standard cubic for day) ini tentu akan membuat perubahan dalam rencana strategis pemerintah Aceh ke depan. Maka konsep Zona Pertanian dan Zona Industri yang pernah digagas oleh Gubernur Ibrahim Hasan pada era 1980-an lalu, mestinya bisa kembali dimunculkan sehingga Aceh memiliki kekuatan ekonomi baru.

Pembangunan tidak akan pernah lepas dari keberadaan manusia terampil dan memiliki keahlian serta kemampuan. Adanya human capital merupakan salah satu syarat dari keberhasilan pembangunan. Sumber daya manusia (SDM) berkualitas untuk menghasilkannya adalah melalui lembaga pendidikan, terutama perguruan tinggi (PT) yang menjadi tempat transfer of knowledge dalam kehidupan. Universitas Teuku Umar (UTU) adalah satu institusi yang menjadi bagian penting dalam melahirkan SDM berkualitas di pantai Barat Selatan ini.

Eksistensi UTU yang diawali dengan Sekolah Pembangunan Pertanian pada 1984 adalah bukti bahwa perguruan tinggi ini memiliki keahlian utama dalam upaya memperkuat dan mengembangkan sektor pertanian sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi. Universitas ini mengambil nama tokoh,

pejuang sekaligus pahlawan yang sangat berani serta memiliki kemampuan dalam manajemen strategi yang begitu hebat.

Maka keberadaan universitas ini harus mampu memberikan warna dan kontribusi penting bagi pembangunan Aceh utamanya di kawasan Barat Selatan ini. Kehadiran UTU sebagai sebuah institusi pendidikan tinggi sangat strategis dalam rangka mewujudkan segi tiga kekuatan pendidikan yaitu UTU, Unimal dan Unsam dalam rangka percepatan pembangunan daerah untuk Aceh yang lebih baik. Hadirnya UTU tentu memiliki peranan penting dalam mempengaruhi perubahan-perubahan dalam masyarakat terutama dalam rangka membangun dan mendorong terciptanya masyarakat pembelajar.

Hal ini sangat penting karena berkaitan erat dalam upaya transformasi sosial dalam kehidupan masyarakat. Kita tidak bisa memungkiri bahwa masih saja perguruan tinggi laksana menara gading, dimana masih terdapat jurang yang dalam antara idealita dengan realita. Namun semua itu bisa diatasi dengan langkah-langkah progresif dan kemauan untuk membangun keberpihakan melalui kegiatan yang sistematis dan memiliki implikasi luas kepada masyarakat seperti program-program kemitraan dan membentuk pilot project yang berbasis pada sumber daya lokal.

Perguruan tinggi tidak saja memiliki kegiatan belajar mengajar yang reguler konvensional, tapi juga harus memiliki peta jalan bagi pengembangan masyarakat yang lebih operasional, yang mampu merespons persoalan mendasar dari masyarakat dimana kita hadir dan berada. Maka tidak ada kata lain kecuali perguruan tinggi membangun kemitraan strategis baik dengan masyarakat, dunia usaha dan pemerintah. Inilah yang akan mengantarkan UTU sebagai pusat keunggulan di zona pertanian yang merupakan Aceh masa depan ini. UTU harus memainkan peran penting dalam proses pembangunan kawasan Barat Selatan Aceh. Disinilah letak arti pentingnya keberadaan UTU sebagai katalisator pembangunan dikawasan ini.

Persaingan di masa akan datang tidak lagi pada tataran sumber daya alam tapi lebih kepada ilmu pengetahuan dan teknologi. Apalagi lagi di tengah kondisi yang disebut sebagai era turbulensi ekonomi, hanya perguruan tinggi yang mampu melakukan terobosan-terobosan yang pada gilirannya diaplikasikan oleh semua stakeholder untuk keluar dari era yang penuh goncangan ini. Seperti dikemukakan Robert B Tucker (2001), di abad ke 21 ini terdapat tantangan yang meliputi kecepatan (speed), kenyamanan (convenience), gelombang generasi (age wave), pilihan (choice), ragam gaya hidup (life style), kompetisi harga (discounting), penambahan nilai (value added), pelayanan pelanggan (customer service), teknologi sebagai andalan (techno age), dan jaminan mutu (quality control).

UTU sebagai institusi yang memiliki perangkat organisasi dan sumber daya manusia yang lebih baik dibandingkan dengan yang lain maka harus mampu menjembatani masyarakat dengan tantangan tersebut dengan cara membangun daya saing daerah, sehingga memiliki kekuatan untuk bersaing dengan daerah lain di Aceh bahkan di Indonesia. Harus dipahami bahwa pembangunan sektor pertanian tidak melulu soal pangan dan produk pertanian lain yang hanya sebatas untuk pemenuhan kebutuhan

akan makanan bagi manusia. Tapi bagaimana pembangunan pertanian yang menciptakan nilai tambah terhadap sumber daya hayati yang juga untuk pemenuhan kebutuhan industri serta energi dalam kegiatan ekonomi.

Menurut Kuznets (1964) dan Todaro (2000), sektor pertanian berkontribusi dalam pembangunan ekonomi sebagai penyerap tenaga kerja, berkontribusi dalam peningkatan pendapatan, penyediaan pangan dan bahan baku, serta berkontribusi dalam bentuk kapital dan sebagai sumber devisa. Poin terakhir ini tentu sangat menarik untuk dicermati, jadi bagaimana upaya untuk bisa mewujudkan hal tersebut maka peran serta UTU sangat dinanti. UTU harus mampu menawarkan program-program revitalisasi pertanian yang ditopang oleh keberadaan industri seperti hadirnya agropolitan di kawasan ini.

Hal tersebut akan terwujud bila UTU dapat membangun sinergisitas dengan pemerintah kabupaten utamanya SKPD yang memiliki tupoksi yang relevan dengan pengembangan sektor pertanian. Disamping itu secara internal kurikulum yang ditawarkan juga harus mampu menjawab tantangan di sektor pertanian tentu tidak hanya untuk fakultas pertanian namun juga pada fakultas ekonomi yang diarahkan bagaimana untuk melahirkan sarjana yang memiliki kemampuan wirausaha disektor pertanian dan berbasis di pedesaan.

Kawasan ini memiliki agroekosistem yang beragam tinggal lagi bagaimana hal tersebut kemudian di tuangkan dalam konsep yang lebih operasional dan implementasinya sesuai maka harus berdasarkan pada community based dan resource based. Di era ini semua daerah dituntut untuk mampu menggali potensi daerah secara optimum dan pada gilirannya dapat digunakan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Jangan sampai kehadiran UTU justru memiliki andil dalam involusi pertanian karena mandegnya riset yang menyangkut dengan sektor ini.

Begitu besarnya peranan sektor pertanian dimasa akan datang sehingga seorang penulis terkenal mengenai investasi memiliki keyakinan bahwa sektor pertanian akan meningkat secara dramatis dalam beberapa dekade ke depan dan lebih cepat dibandingkan dengan industri-industri yang lain. Selama beberapa tahun terakhir ini dikarenakan kenaikan bisnis biofuel telah membuat bisnis pertanian tumbuh sangat meyakinkan.

Stephen Gandel menulis bahwa di Amerika Serikat saat ini mulai timbul kesadaran bahwa menjadi petani yang kini banyak digandrungi warga Amerika, adalah pekerjaan paling bagus pada abad ke-21 (Majalah Time edisi 11/Juli 2011). Maka berdasarkan hal di atas jelas sekali bahwa UTU memiliki peran dan kontribusi besar dalam upaya penguatan masyarakat dan pemerintahan di kawasan Barat-Selatan Aceh. Hal ini semakin dimungkinkan karena telah bergesernya paradigma dan pola pembangunan dari awalnya yang bersifat sentralisasi menjadi desentralisasi.

UTU memiliki peluang besar untuk maju dan berkembang serta memiliki posisi tawar yang

tinggi dalam mendesain dan membangun peta jalan bagi Barat Selatan yang lebih maju dan berkembang di masa akan datang. Keberadaan UTU yang sangat strategis harus dioptimalkan dalam rangka mengembangkan dan potensi daerah yang akan menjadi sumber kekuatan ekonomi baru yaitu sektor pertanian sektor yang akan memberikan dampak luas terhadap masa depan dunia.

Eksistensi Universitas Gajah Putih

Eksistensi kehadiran Perguruan Tinggi harus membawa kemaslahatan bagi pemerintah dan masyarakat. Percepatan pengembangan sumber daya dosen menjadi hal mutlak yang harus dilakukan oleh Universitas Gajah Putih. Untuk menjadi perguruan tinggi yang berkelas, maka sistem akademis harus dibangun secara kondusif dan bermutu.

Peningkatan mutu sebuah perguruan tinggi, tidak terlepas dari mewujudkan tridarma perguruan tinggi, yang mencerminkan identitas berbasis budaya. Secara umum, ada 3 poin kehadiran perguruan tinggi. Apa yang kita sebut dengan tridarma perguruan tinggi.

Pertama adalah pendidikan dan pengajaran. Pengertian pendidikan dan pengajaran disini adalah dalam rangka meneruskan pengetahuan atau dengan kata lain dalam rangka transfer ilmu pengetahuan yang telah dikembangkan sumber daya manusia di perguruan tinggi.

Kedua adalah penelitian dan pengembangan. Kegiatan penelitian dan pengembangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tanpa penelitian pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akan menjadi terhambat. Penelitian ini tidaklah berdiri sendiri, akan tetapi harus dilihat keterkaitannya dalam pembangunan dalam arti luas. Dengan penelitian akan mampu melahirkan konsep, metode dan proyeksi dalam membangun suatu daerah.

Ketiga adalah pengabdian pada masyarakat. Pengabdian pada masyarakat harus diartikan dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah dikembangkan di perguruan tinggi. Bukan sebaliknya, membawa malapetak kepada masyarakat. Aktivitas pengabdian dapat dilakukan secara individu-individu maupun kelompok-kelompok insan akademis pada masyarakat. Tri darma perguruan tinggi harus diterjemahkan secara membumi. Artinya ketiga faktor ini erat hubungannya dalam eksistensi sebuah perguruan tinggi.

Universitas Gajah Putih memiliki peluang untuk menjadi universitas andalan di daratan tinggi Gayo. Untuk menjadi universitas handal, sudah seharusnya sebuah perguruan tinggi tidak lagi mengejar kuantitas. Melainkan harus konsisten dalam peningkatan kualitas setiap lulusan.

Pengembangan sumber daya manusia adalah suatu proses pengetahuan, ketrampilan, dan kapasitas dari semua penduduk suatu daerah. Dewasa ini, perkembangan terbaru memandang bahwa SDM bukan saja sebagai sumber daya belaka, melainkan lebih berupa modal atau asset bagi institusi dan

masyarakat.

Beranjak dari itu, setidaknya Universitas Gajah Putih harus memiliki peran dalam pembangunan di kawasan Aceh Tengah. Setidaknya, ada 5 peran yang bisa dikontribusikan oleh Universitas Gajah Putih kepada daerah kawasan Aceh Tengah.

Pertama, Universitas Gajah Putih mengisi pembangunan kawasan Aceh Tengah dengan riset-riset yang aplikatif dan membumi, terutama pada sektor perkebunan, pertanian dan perdagangan. Supaya komoditas andalan, seperti KOPI GAYO terjaga kualitasnya terus menerus.

Kedua, Universitas Gajah Putih, harus mampu memberi kontribusi, bagi pembangunan kawasan Aceh Tengah, melalui pendidikan berbasis skill. Sudah seharusnya, sebuah universitas memuat kurikulum kewirausahaan bagi mahasiswanya, supaya setiap lulusan perguruan tinggi memiliki spirit untuk berwirausaha.

Ketiga, Universitas Gajah Putih harus menjadi kontrol sosial, bagi pembangunan daerah, dengan ide-ide yang berbasis sosial capital, dan berbasis budaya Gayo. Keempat, Universitas Gajah Putih, harus membangun kemitraan yang berkelanjutan, dengan lembaga-lembaga regional, nasional dan internasional sebagai upaya untuk pembangunan masyarakat Aceh Tengah yang mandiri dan merdeka dari kemiskinan dan ketertinggalan.

Kelima, Universitas Gajah Putih, harus memperkuat dirinya dalam bidang penataan sumber daya dosen, karyawan, dan manajemen yang modern yang berbasis teknologi informasi, dalam upaya memperkuat peran pada sektor pembangunan eksternal kampus.

KESIMPULAN

Terlepas dari pembahasan diatas, secara empiris eksistensi perguruan tinggi secara umum di Indonesia sedang mengalami degradasi prestasi skala regional dan internasional. Menurut catatan The Times Higher Education Asia University Rankings 2013, tidak ada satu universitas pun dalam katagori 100 terbaik universitas di Asia. Sedangkan Negara kita, seperti Singapura , Thailand dan Malaysia memiliki beberap Universitas mereka berada dalam rangking 100 terbaik Asia.

Meskipun sumber daya yang berlimpah dihabiskan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan tampaknya eksistensi universitas di Indonesia butuh waktu yang lama untuk bisa bersang di ASEAN, apalagi di Asia atau global.

Dibalik pembahasan diatas, beberapa masalah fundamental yang kita hadapi dalam meningkatkan sistem pendidikan tinggi di Indonesia. Pertama manajemen sistem pendidikan Indonesia yang tidak berbasis pada tindak lanjut (sustainable) yang sistemik. Kedua belum ada roadmap baku tentang skema otonomisasi pengelolaan pendidikan tinggi, antar provinisial dengan pemerintah pusat.

Ketiga sistem birokrasi pendidikan yang rumit pada perencanaan, proses dan dampak dari eksistensi sebuah perguruan tinggi. Keempat standar pendidikan nasional belum optimal dijalankan sesuai dengan kebijakan undang-undang yang berlaku. Kelima proses pendidikan yang sentralistik, kedepan sudah seharusnya proses pendidikan harus berbasis pada kearifan lokal. Demikian bebera poin kesimpulan dibalik interpretasi eksistensi perguruan tinggi. Namun demikian kita harus optimis bahwa sektor pendidikan adalah salah satu entri poin bagi pengembangan Indonesia kedepan.

DAFTAR PUSTAKA

- Apridar, (2013), *Desain Pembangunan Pendidikan Aceh*, Opini. Harian Serambi Indonesia, Banda Aceh.
- Djadjang A. (2010). *Kapita Selekta Kuliah Azas-azas Manajemen*. Sekolah Tinggi Manajemen Indonesia, Jakarta.
- Endang Sunarya, (2002). *Teori Perencanaan Pendidikan, Berdasarkan Pendekatan Sistem*. Adicita Karya Nusa, Yogyakarta.
- Mukhlisuddin Ilyas, (2008), *Aceh Dan Romantisme Politik*, Bandar Publishing, Banda Aceh
- Anonim (2008), *Manajemen Pendidikan Satu Atap Untuk Aceh*, dalam *Jurnal Cendekia*, IAIN Ar Raniry, Banda Aceh.
- Anonim (2009), *Pendidikan Aceh Sekuler*. Kolom Opini. Harian Serambi Indonesia. Banda Aceh.
- Anonim (2012), Chapter dalam buku *Rancang Bangun Demokrasi Dalam Imaji Aceh Baru*, editor Reza Indria. Yayasan TIFA Fondation, Jakarta.
- Anonim (2013), *Pendidikan Dayah di Aceh Mulai Hilang Identitas*, Pale Media Indonesia, Yogyakarta.
- Murizal Hamzah (2013), *Wali Nanggroe Unfinished Story*. Kolom Opini, Harian Serambi Indonesia, Banda Aceh
- Nur Zazin, 2011. *Gerakan Menata Mutu Pendidikan, Teori dan Aplikasi*, Ar Ruzz, Yogyakarta.
- P. Sondang, 2003. *Manajemen Stratejik*. Bumi Aksara. Jakarta.